

INTISARI

Otonomi daerah menuntut setiap daerah menerapkan kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran. Hal ini supaya anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Penetapan anggaran dengan pertimbangan yang matang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kondusif. Kepala daerah yang ingin mengajukan diri dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) berikutnya menunjukkan adanya kecenderungan memanfaatkan belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan terutama ketika menjelang pilkada.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja modal untuk daerah di Pulau Jawa yang mengalami dua periode kepemimpinan kepala daerah. Periode dalam penelitian ini adalah tahun 2000 sampai dengan 2014. Penelitian ini menggunakan proporsi atau alokasi belanja dengan memperhatikan dinamika perkembangan selama sepuluh tahun. Alat analisis yang digunakan adalah uji normalitas dan uji sampel berpasangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan (kenaikan) antara belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan antara tahun sebelum dan waktu pilkada; tidak ada perbedaan signifikan antara belanja tahun waktu pilkada dan setelah pilkada; untuk periode pertama ke periode kedua terjadi kenaikan. Sementara itu, untuk belanja modal tidak terdapat perbedaan signifikan, baik antara sebelum pilkada, waktu pilkada, setelah pilkada, periode pertama, dan periode kedua.

Kata kunci: otonomi daerah, pilkada, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja modal, pemerintah daerah, proporsi, alokasi

ABSTRACT

Local government is required to implement planning and budgeting policies regarding to regional autonomy, so that, the community would gain benefits. Considering the budget arrangement could create economic growth conducive. Local leaders who nominated in the next local elections tend to utilize grant expenditure, social expenditure, financial aid expenditure, especially while approaching elections.

This study aims to analyze the grant expenditure, social expenditure, financial aid expenditure, as well capital expenditures in Java Island that experienced two leadership periods of the local leader (incumbent). This study is implemented for 2000 up to 2014 leadership periods. This study considered the proportion or allocation of expenditures by observing the fluctuation over the past ten years. Normality and paired sample tests were used for the analysis process.

The results showed that there was a significant difference (increase) among grant expenditure, social expenditure, financial aid expenditure before and during the elections; there was no significant difference on those three expenditures during and after the elections; it was also reported increase on the first to the second leadership periods. Meanwhile, there were no significant differences before, during, and after the elections, as well the first and the second period.

Keywords: autonomy, election, grant expenditure, social expenditure, financial aid expenditure, local government, proportion, allocation